



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANIES RASYID BASWEDAN**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **180169**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 13.078.490.000**

1. Tanah Seluas 91 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 633.633.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1655 m2/798 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.324.975.000
3. Tanah Seluas 2175 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 178.350.000
4. Tanah Seluas 483 m2 di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 61.824.000
5. Tanah Seluas 116 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 879.708.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 640.000.000**

1. MOBIL, MAZDA 2 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
3. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT Tahun 1968, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI EX250V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.039.700.805****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 59.650.535****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.177.292.250**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	592.311.064
Sub Total	Rp.	16.587.444.654
III. HUTANG	Rp.	5.523.276.663
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.064.167.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.